



MESKI TERKENDALA JUMLAH PERSONEL

Kewenangan Camat Akan Ditambah

YOGYA (MERAPI) - Pelimpahan kewenangan sebagian walikota ke kepada camat di Kota Yogyakarta terus dievaluasi. Pada pertengahan tahun ini urusan kewenangan yang dilimpahkan ditambah. Wilayah juga akan mengurus kebu-
dayaan dan kesehatan.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Yogyakarta, Zenni menjelaskan penambahan kewenangan camat itu berdasarkan evaluasi pelaksanaan pelimpahan selama ini dinilai sudah berjalan. Sudah ada lima urusan yang dilimpahkan ke camat yaitu otonomi daerah, pemberdayaan ekonomi, perdagangan, pekerjaan umum dan lingkungan hidup.

"Penambahannya pada urusan kesehatan dan kebudayaan. Misalnya dalam hal pengembangan kesenian diserahkan ke camat. Kegiatan kesehatan seperti posyandu juga dilakukan camat," terang Zenni di ruang kerjanya, Rabu (20/8).

Dia mengatakan, sebenarnya urusan itu sudah dilakukan di wilayah selama ini. Namun anggaran kegiatan masih melekat di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait. Pendampingan juga diberikan dari SKPD terkait kepada wilayah dalam menjalankan urusan pelimpahan kewenangan sebagian walikota.

Penambahan urusan pelimpahan kewenangan itu diatur dalam Perwal Nomor 41 tahun 2014 untuk camat dan Perwal Nomor 42 untuk lurah. Perwal itu merevisi Perwal Nomor 52 tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dan lurah.

"Kewenangan itu diberikan karena kebutuhan wilayah agar pelaksanaan kegiatan lebih efisien. Tujuan utamanya untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat," paparnya.

Namun diakui, pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota ke wilayah ada hambatan dari sisi personel jumlah dan kualitas di camat dan kelurahan. Apalagi dana yang dikelola wilayah bertambah dibandingkan sebelum ada pelimpahan kewenangan.

Saat ini di kecamatan rata-rata ada 15 orang personel dan di kelurahan berkisar 7-9 orang. Di sisi lain pemkot tidak dapat menambah personel karena kebijakan pembatasan rekrutmen CPNS. "Untuk mengatasinya camat merekrut tenaga teknis dalam satu kegiatan. Tergantung kegiatannya dan dari sisi anggaran akan didukung," tambahnya.

Pemkot juga akan mengeluarkan perwal petunjuk teknis perwal baru itu. Perangkat camat akan diundang untuk pembekalan teknis. Pihaknya menegaskan dalam penambahan pelimpahan kewenangan wilayah tidak akan dilepas.

Sementara itu Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kota Yogyakarta Achmad Fadli mengatakan penyusunan perwal baru disesuaikan dengan penambahan urusan kewenangan. Terutama kebutuhan kegiatan di wilayah agar pelaksanaannya lebih efisien. "Penyusunan perwal itu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Ada penambahan urusan pelimpahan sebagian kewenangan walikota ke camat," kata Fadli. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005